

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang telah menjadi acuan arah pembangunan pada masa Pemerintahan Presiden Suharto, maka *Loan Agreement* yang telah diadakan antara *World Bank* dan Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru tersebut (1965-1998) telah sesuai dengan Asas Kepentingan Nasional. Setiap proyek yang dilakukan dengan pembiayaan oleh *World Bank* menurut penulis sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada masa tersebut. Kebijakan luar negeri Presiden Suharto dirasa tepat dengan mendatangkan dana dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di Indonesia, karena pada saat tersebut Indonesia belum cukup modal untuk membangun dan membuat Indonesia menjadi lebih baik.
2. *Loan Agreement* yang dibuat antara Indonesia dengan *World Bank* akan membuat Indonesia memiliki modal untuk melakukan pembangunan. Namun dalam setiap dana yang datang karena dipinjam

dari *World Bank* tentu dikemudian hari akan menjadi hutang yang terus membengkak. Terutama fluktuasi mata uang dan bunga atas pinjaman tersebutlah yang membuat Indonesia akan terus bertambah dan bertambah. Hal ini kemudian akan membuat Indonesia menjadi negara yang lemah, dikarenakan Indonesia akan selalu ditekan oleh *World Bank* atau secara implisit ditekan oleh Amerika yang persentase pemilikan sahamnya paling besar dalam Lembaga Keuangan Internasional tersebut, akibatnya Indonesia tidak dapat leluasa dalam mengarahkan kebijakan dalam ataupun luar negerinya. Disamping itu terdapat beberapa klausa yang menurut penulis telah mengkebiri kedaulatan Indonesia secara nyata, baik dari segi ekonomi, territorial, maupun hukum. Maka dari itu menurut penulis *Loan Agreement* yang dibuat antara Indonesia dan *World Bank* bertentangan dengan penerapan asas Kedaulatan Negara.

B. SARAN

1. *Loan Agreement* yang dilakukan oleh Indonesia dan *World Bank* harus lebih efektif lagi, meskipun apa yang telah terjadi di masa Orde Baru telah cukup baik, namun tetap perlu di tingkatkan lagi kesesuaian antara pinjaman yang dilakukan kepada *World Bank* dengan Kepentingan Nasional Indonesia. Sehingga pemerintahan Indonesia sekarang ini dapat lebih mensejahterakan bangsanya. Indonesia harus mengurangi ketergantungannya terhadap modal asing, agar Indonesia tidak lagi menjadi negara yang lemah. Kelola sumber

daya alam yang dimiliki Indonesia, tingkatkan produksi, agar Indonesia memiliki modal yang besar untuk membangun negeri.

2. Pejabat Kuasa Penuh harus lebih teliti dan rinci dalam melakukan negosiasi dengan *World Bank* dalam rangka pembuatan *Loan Agreement*. Jangan sampai ada satu klausul pun yang kemudian akan membuat Kedaulatan Indonesia melemah. Perjuangkan penuh Kepentingan Nasional dan pertahankan Kedaulatan Negara agar tidak dapat diganggu gugat.

